

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencetuskan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs ini disusun atas dasar *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah diupayakan sejak tahun 2000 hingga 2015 yang lalu, dimana sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2016, hal. 3)

SDGs telah diadaptasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menandai bahwa Indonesia turut serta mendukung gagasan dari SDGs ini. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesenjangan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota Dan Pemukiman yang berkelanjutan, 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13)

Penanganan perubahan iklim, 14) Ekosistem laut, 15) Ekosistem daratan, 16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. (United Nations)

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini memiliki 169 target. 169 target tersebut 57% (96 Target) di antaranya telah sesuai dengan target TPB. (Badan Pusat Statistik, 2016, hal. 4) Prioritas Pembangunan Nasional yang sesuai dengan target TPB lebih rinci akan dijelaskan pada tabel 1.1

Tabel 1.1: Prioritas Nasional dan Target RPJMN yang Sesuai dengan Target TPB

Pilar	Target Global	Target RPJMN 2015-2019	Beberapa Prioritas Nasional
Sosial (1, 2, 3, 4, 5)	47	27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 3. Peningkatan Kedaulatan Pangan 4. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat 5. Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marginal
Ekonomi (7, 8, 9, 10, 17)	54	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan Energi 2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 4. Membangun Konektivitas Nasional 5. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 6. Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif

Lingkungan (6, 11, 12, 13, 14, 15)	56	31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan Air 2. Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Penangan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan 4. Pengurangan Emisi GRK 5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 6. Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hukum dan Tata Kelola (16)	12	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI 2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan 3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Total	169	96	

Sumber: Sekretariat SDGs Nasional dalam Badan Pusat Statistik, 2016

Tabel di atas menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki 96 target TPB atau sekitar 57% dari Target TPB. Poin ke 4 dalam tabel 1.1 adalah pendidikan yang berkualitas, dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional yaitu pembangunan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) menjelaskan bahwa pembangunan SDM diarahkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu:

1. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

2. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan
3. Membangun infrastruktur yang maju

Tujuan di atas dapat terlaksana dengan peran dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan daerah, lembaga-lembaga pendidikan sebagai institusi yang menjalankan fungsi pendidikan secara formal maupun non formal, serta peran lingkungan sebagai pemegang pendidikan informal. Pemangku kepentingan harus bersama-sama membangun kualitas pendidikan yang baik dan merata.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”. (Pasal 1, UU. No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas)

Pendidikan dibagi menjadi 3 menurut UU. 20 Tahun 2003 antara lain:

- 1) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 2) Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 3) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan formal, non formal, dan informal memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Pendidikan formal yang merupakan jenjang

pendidikan dasar, menengah dan tinggi membentuk pola pikir saintifik dan terstruktur. Pendidikan non formal yang bertindak sebagai suplemen, komplemen, maupun substitusi pendidikan formal yang berbasis kepada kebutuhan belajar masyarakat. Pendidikan informal yang merupakan fondasi dari langkah awal seorang individu dibentuk dan diarahkan atau mendapatkan arah serta dukungan untuk seseorang dapat menjadi apa pun yang seseorang itu inginkan.

Keterkaitan antara pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal, memicu banyak pertumbuhan lembaga pendidikan non formal baik secara konvensional maupun daring. Lembaga non formal sebagai lembaga pendidikan yang dapat memberikan pelayanan pendidikan non formal diminati dari segala usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bimbingan belajar merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan non formal yang dibutuhkan dan banyak diminati oleh masyarakat.

Pendidikan informal sebagai pendidikan yang berasal dari lingkungan individu memiliki andil yang cukup besar. Dibalik andilnya yang besar, pendidikan informal masih kurang diperhatikan. Pemukiman kumuh di sekitar lingkungan Cipinang Muara menjadi saksi betapa kurangnya perhatian terhadap pentingnya pendidikan informal. Pendidikan informal yang kurang baik, seperti keluarga yang tidak

harmonis, adanya tindakan kekerasan, dan kurangnya sosial kontrol menyebabkan kebiasaan baru yang tertanam dalam setiap individu. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan, baik secara sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Keluarga dan lingkungan yang berada dalam kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang buruk menyebabkan banyak masalah sosial salah satunya adalah anak terlantar. Penyebab anak terlantar bisa karena orang tua yang bercerai atau tidak mau mengurus, tingkat ekonomi yang rendah, dan tingkat literasi yang rendah.

International Humanity Foundation (IHF) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat di tingkat Internasional yang berdiri sejak tahun 2002. IHF bergerak di bidang pendidikan dan perlindungan sosial bagi anak-anak yatim/piatu, terlantar, atau ditinggal oleh orang tua. IHF tersebar di 3 Negara yaitu Indonesia, Thailand, dan Kenya.

IHF di Indonesia dikenal sebagai Yayasan Asah Asih Asuh dan memiliki 3 lokasi pusat yakni di Jakarta, Medan, dan Bali. Jakarta Center IHF ini berlokasi di Komplek Cipinang Elok 1, Jakarta Timur. Yayasan ini berdiri di Jakarta pada tahun 2006 sebagai *Home Center* untuk anak-anak yatim/piatu, terlantar dan ditinggalkan oleh orang tuanya.

Anak-anak yang dirawat di *Home Center* diberikan pendidikan dan penghidupan yang lebih baik. Program *Home Center* saat ini sudah tidak ada dikarenakan program ini tidak mendukung dan sepenuhnya berubah menjadi *Education Center*. *Education center* ini ditujukan kepada anak-anak kurang mampu mengakses pendidikan berkualitas.

Sharma (2004, hal. 183) mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendidikan yang substansial di masyarakat termasuk disparitas serius dari sistem pendidikan. Disparitas pendidikan menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam dunia pendidikan. Kesenjangan tersebut dapat ditemukan didalam pendidikan formal. Satuan pendidikan formal memiliki kualitasnya masing-masing, dimana perbedaan kualitas ini dapat memicu adanya kesenjangan. Kesenjangan ini membuat peran pendidikan non formal berjalan. IHF memiliki salah satu tujuan, yaitu ingin mengejar kesenjangan yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia.

Pratiwi (2018) menyatakan bahwa kondisi fisiologis mempengaruhi kondisi belajar sebesar 48% dan kondisi psikologis sebesar 55,6%. Anak-anak mengalami ketimpangan sejak lahir, pemenuhan nutrisi, serta lingkungan yang kondusif menjadi faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Hal tersebut membuat IHF mengubah *Home Center* menjadi *Education Center*, dengan memberikan pelayanan pendidikan

non formal gratis bagi anak-anak yang membutuhkan. *Education Center* ini diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan IHF dalam mengejar kesenjangan yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia.

Yayasan melibatkan relawan dalam memberikan layanan pendidikan nonformal. IHF memiliki misi dengan melibatkan relawan lokal akan membantu pembelajaran yang lebih komprehensif. Peneliti tertarik meneliti tentang “Peran Relawan Yayasan Asah Asih Asuh Jakarta dalam pelayanan Pendidikan Non Formal di Cipinang Muara, Jakarta Timur” untuk mengetahui manfaat menjadi relawan khususnya dalam bidang pelayanan pendidikan non formal.



B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah peranan relawan Yayasan Asah Asih Asuh Jakarta dalam pelayanan pendidikan non formal di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana peranan relawan Yayasan Asah Asih Asuh dalam pelayanan pendidikan non formal ?
2. Apa saja jenis kegiatan yang diselenggarakan di Yayasan Asah Asih Asuh?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Yayasan Asah Asih Asuh terkait dengan manajemen kerelawanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan relawan Yayasan Asah Asih Asuh dalam pelayanan pendidikan non formal.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan yang terdapat di Yayasan Asah Asih Asuh.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Yayasan Asah Asih Asuh terkait dengan manajemen kerelawanan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan lebih tentang peranan relawan Yayasan Asah Asih Asuh dalam pelayanan pendidikan non formal di masyarakat serta memberikan kesadaran kepada pemerintah maupun masyarakat luas tentang pentingnya kualitas layanan pendidikan untuk pembangunan SDM.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kendala-kendala yang terjadi pada Yayasan Asah Asih Asuh dalam manajemen kerelawanan pada pelayanan pendidikan non formal yang dilaksanakan serta mampu untuk memberikan gambaran kepada lembaga non formal lain dalam peningkatan layanan pendidikan non formal.